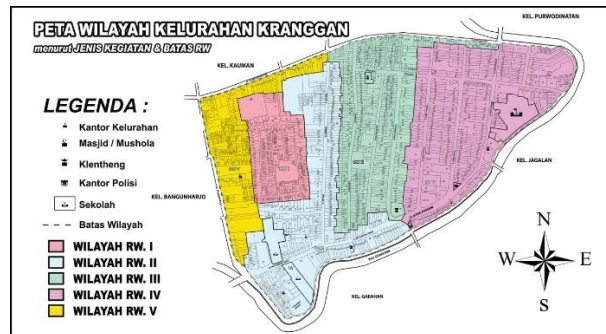


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambar 2.1 Peta Kelurahan Kranggan



Sumber : Kelurahan Kranggan, Pemerintah Kota Semarang

Gang Pinggir merupakan salah satu ruas jalan utama yang memiliki peran penting di kawasan Pecinan Kota Semarang. Secara administratif, wilayah Pecinan yang menaungi Gang Pinggir berada di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Letaknya yang berdekatan langsung dengan aliran Kali Semarang membuat kawasan ini disebut *pinggir*, yang secara harfiah berarti tepi sungai. Adapun batas-batas wilayah Pecinan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut, di bagian utara berbatasan dengan Jalan Gang Lombok, di bagian barat dengan Jalan Beteng, di bagian selatan dengan Kali Semarang atau Jalan Sebandaran I, dan di bagian timur kembali dibatasi oleh aliran Kali Semarang. Posisi geografis tersebut menjadikan Gang Pinggir memiliki nilai strategis yang tinggi, baik dari segi aksesibilitas maupun aktivitas ekonomi. Jalur ini sering dimanfaatkan sebagai pusat perlintasan masyarakat, kegiatan perdagangan, serta interaksi sosial yang menjadi ciri khas dinamika kawasan Pecinan. Selain itu, keberadaannya turut memperkuat identitas budaya dan ekonomi

lokal yang telah berkembang sejak lama di jantung Kota Semarang.

Kawasan Pecinan Semarang mulai terbentuk pada abad ke-18 sebagai dampak dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan permukiman masyarakat Tionghoa dari wilayah sekitar Gedong Batu ke pusat kota Semarang. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah proses pengawasan terhadap aktivitas masyarakat Tionghoa, terutama setelah terjadinya pemberontakan etnis Tionghoa di Batavia pada tahun 1740. Sebagai tindak lanjut dari peristiwa tersebut, pemerintah kolonial memperkuat sistem pengaturan pemukiman melalui kebijakan yang dikenal dengan *wijkenstelsel*, yakni sistem yang mengatur pemisahan wilayah tempat tinggal berdasarkan etnis. Dalam konteks inilah, Gang Pinggir kemudian muncul sebagai salah satu jalan penting di kawasan Pecinan. Dahulu, jalan ini dikenal dengan nama Tionghoa “Tang-kee”, sebelum akhirnya diubah menjadi “Gang Pinggir” pada masa penjajahan Inggris atau Britania (1811-1818) sebagai bagian dari penataan ulang dan penyesuaian nama-nama jalan di kawasan Pecinan Semarang. Pergantian nama tersebut tidak hanya mencerminkan perubahan administratif, tetapi juga menjadi simbol dinamika sosial dan politik yang mewarnai perkembangan sejarah kota Semarang pada masa kolonial.

2.1.1 Kondisi Geografis

Kelurahan Kranggan merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini terletak di kawasan pusat kota dengan ketinggian rata-rata sekitar +2 meter di atas permukaan laut, sehingga tergolong sebagai daerah dataran rendah. Dengan luas wilayah sekitar 25,25 hektar, Kelurahan Kranggan memiliki batas wilayah yang

berbatasan dengan Kelurahan Kauman di sebelah utara, Kelurahan Gabahan di selatan, Kelurahan Bangunharjo di barat, dan Kelurahan Jagalan di timur. Letaknya yang hanya berjarak sekitar dua kilometer dari pusat Kota Semarang menjadikan wilayah ini memiliki nilai strategis tinggi, terutama dalam aktivitas sosial ekonomi masyarakatnya. Kepadatan penduduk yang tinggi serta dominasi kegiatan perdagangan dan permukiman menunjukkan bahwa Kranggan merupakan kawasan urban yang dinamis dan berkembang pesat. Kondisi geografis yang relatif datar juga mendukung terbentuknya lingkungan dengan mobilitas tinggi dan kemudahan akses terhadap berbagai fasilitas kota.

2.1.2 Kondisi Demografis

Saat ini, kawasan pecinan Semarang yang berada di wilayah Kecamatan Semarang Tengah mengalami penurunan jumlah penduduk dalam tujuh tahun terakhir. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tingginya angka migrasi keluar serta perubahan fungsi kawasan dari area hunian menjadi pusat perdagangan dan jasa. Berdasarkan data dari Kantor Kecamatan, hingga Februari 2022 jumlah penduduk di Kecamatan Semarang Tengah tercatat sebanyak 68.044 jiwa, terdiri dari 32.868 laki-laki dan 35.176 perempuan (Kecamatan Semarang Tengah, 2025). Meskipun belum ada data spesifik penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di kawasan Pecinan kini lebih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, menggantikan fungsi permukiman yang sebelumnya lebih menonjol.

Masyarakat di kawasan Pecinan Semarang saat ini mengalami perubahan ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan hasil penelitian, sejak awal berdirinya hingga masa kini, fungsi utama kawasan ini telah bergeser dari permukiman menjadi

pusat kegiatan perdagangan dan jasa. Bangunan rumah toko (ruko) kini mendominasi kawasan tersebut, berperan ganda sebagai tempat usaha sekaligus tempat tinggal, sehingga turut membentuk ulang struktur sosial dan ekonomi masyarakatnya. Penelitian berjudul *Konservasi Kampung Pecinan Semarang sebagai Media Integrasi yang Berdimensi Multikulturalisme* juga menjelaskan bahwa area seperti Gang Pinggir merupakan titik penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal, di mana masyarakat Tionghoa telah lama aktif dalam aktivitas perdagangan dan mampu memanfaatkan posisi strategis kawasan ini untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, masyarakat di Gang Pinggir dan sekitarnya kini dapat dipahami sebagai komunitas yang kehidupannya sangat bergantung pada sektor komersial, terutama perdagangan ritel dan jasa, serta memiliki jaringan sosial yang fleksibel terhadap perubahan fungsi ruang. Namun, dinamika tersebut juga menimbulkan tantangan baru dalam menyesuaikan pola hubungan sosial antar etnis dan interaksi dengan masyarakat non-Tionghoa di sekitar kawasan tersebut.

2.2 Kondisi Politik dan Sosial di Kota Semarang

Di Kota Semarang, sistem pemerintahan daerah dijalankan melalui struktur yang dipimpin oleh wali kota bersama perangkat daerahnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2020 mengenai susunan organisasi serta tata kerja birokrasi pemerintah kota (JDIH Semarang, 2020). Dalam ranah politik, pasangan petahana Hendi-Ita pada Pemilihan Wali Kota Semarang tahun 2020 menunjukkan dominasi yang cukup kuat melalui dukungan koalisi besar yang melibatkan delapan partai politik utama. Kekuatan politik ini semakin kokoh

ketika sejumlah partai non-parlemen turut bergabung dalam koalisi tersebut, sehingga memperluas basis dukungan hingga mencakup hampir seluruh spektrum politik lokal. Koalisi yang solid ini menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan Hendi-Ita dalam memperoleh sekitar 89,3% suara pemilih. Dukungan besar tersebut tidak hanya mencerminkan popularitas pasangan petahana, tetapi juga menunjukkan efektivitas strategi politik mereka dalam membangun jaringan kekuatan dan menjaga stabilitas dukungan lintas partai di tingkat daerah.

Sementara itu, pada Pilkada 2020 tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang tercatat sebesar 68,62%, meningkat dibandingkan sekitar 65% pada pemilihan sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kesadaran politik warga, di mana masyarakat semakin memahami pentingnya peran mereka dalam menentukan arah pemerintahan daerah. Meskipun dalam kontestasi politik tersebut masih terlihat dominasi petahana dan kekuatan partai- partai besar, antusiasme warga untuk turut serta menggunakan hak pilihnya menunjukkan bahwa proses demokrasi di tingkat lokal semakin hidup. Hal ini sekaligus menandakan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi politik yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat sipil, mulai memberikan hasil nyata dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara lebih luas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Pemerintah Kota Semarang memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu. Berbagai

program edukasi dan sosialisasi dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya menggunakan hak pilih. Sebagai contoh, pada Maret 2024 KPU bersama Bawaslu dan Kesbangpol Kota Semarang menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik bertema “*Peran Masyarakat dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024*” yang bertujuan memperkuat pemahaman publik mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam berdemokrasi. Selain itu, pemerintah kota juga mendorong inovasi dengan mengadakan lomba Tempat Pemungutan Suara (TPS) unik untuk menarik minat masyarakat agar lebih antusias berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Di sisi lain, Bawaslu turut berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu dengan merilis peta kerawanan menjelang Pilkada 2024 serta melakukan berbagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran guna memastikan terselenggaranya proses demokrasi yang transparan dan kredibel.

2.3 Gambaran Umum Masyarakat Tionghoa di Gang Pinggir

Komunitas etnis Tionghoa telah menjadi bagian dari sejarah panjang Kota Semarang sejak masa kolonial, seiring dengan peran strategis kota ini sebagai pelabuhan utama di pesisir utara Pulau Jawa. Kedatangan mereka tidak hanya terkait dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga turut membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Berdasarkan berbagai penelitian, terbentuknya kawasan Pecinan di Semarang berawal dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-18. Kebijakan ini muncul setelah terjadinya pemberontakan etnis Tionghoa di Batavia pada tahun 1740, yang mendorong pemerintah kolonial memindahkan komunitas Tionghoa ke wilayah khusus agar lebih mudah diawasi oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Pemindahan tersebut kemudian melahirkan kawasan Pecinan sebagai tempat permukiman yang terorganisasi, dengan karakter arsitektur khas berupa deretan rumah toko atau *ruko* yang berfungsi ganda sebagai tempat tinggal dan usaha. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini berkembang menjadi pusat perdagangan yang vital, sekaligus ruang pertemuan antara kebudayaan Tionghoa dan Jawa. Interaksi yang terjadi selama berabad-abad tersebut melahirkan bentuk akulturasi yang tampak jelas dalam gaya bangunan, tradisi keagamaan, hingga pola kehidupan sosial masyarakatnya, menjadikan Pecinan Semarang bukan sekadar wilayah etnis, tetapi juga simbol harmonisasi budaya dan warisan sejarah kota.

Komunitas etnis Tionghoa di Kota Semarang memperlihatkan kemampuan adaptasi sosial yang aktif dan dinamis dalam membangun hubungan dengan masyarakat non-Tionghoa. Berdasarkan penelitian Rina Kurniati et al. (2020), beragam kegiatan budaya Tionghoa yang dilaksanakan di ruang publik kawasan Pecinan tidak hanya diminati oleh komunitas Tionghoa, tetapi juga menarik partisipasi masyarakat dari berbagai latar etnis lain, baik sebagai peserta aktif maupun penonton. Keberagaman partisipan ini menunjukkan bahwa ruang publik di kawasan tersebut berfungsi sebagai wadah interaksi sosial yang inklusif, tempat berbagai kelompok masyarakat dapat saling mengenal dan berbaur melalui aktivitas budaya. Situasi ini tidak hanya memperkaya dinamika sosial di lingkungan Pecinan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan, toleransi, dan kohesi sosial antarwarga, sekaligus mempertegas peran ruang publik sebagai media integrasi budaya yang harmonis di tengah kehidupan masyarakat multietnis.

Selain itu, hasil penelitian tentang komunitas Muslim Tionghoa di Kota

Semarang memperlihatkan bahwa unsur budaya Tionghoa, seperti penggunaan bahasa, pelaksanaan tradisi, serta berbagai bentuk ritual, masih dipertahankan dengan kuat oleh masyarakatnya. Namun, unsur-unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diadaptasikan dan dipadukan dengan praktik keagamaan Islam yang umumnya dipengaruhi oleh budaya Jawa-Muslim. Proses akulturasi ini menggambarkan bagaimana komunitas Muslim Tionghoa mampu menjaga warisan budaya leluhur mereka tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Dengan demikian, tercipta suatu harmoni sosial dan budaya yang menunjukkan keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai etnis dan penerimaan terhadap budaya mayoritas. Fenomena ini juga menjadi bukti bahwa identitas ganda sebagai Tionghoa dan Muslim dapat berjalan berdampingan secara selaras melalui sikap saling menghormati dan keterbukaan antarbudaya dalam kehidupan masyarakat Semarang yang multietnis (Musaffa, Taufiqurohman, Abdurrahman, & Muhyidin, 2025, p. 1). Dengan demikian, partisipasi aktif komunitas Tionghoa dalam kegiatan sosial lintas etnis seperti pasar rakyat, acara keagamaan bersama, hingga penggunaan ruang usaha yang terbuka untuk umum menunjukkan bahwa adaptasi sosial yang mereka lakukan bukan sekadar upaya untuk menyesuaikan diri, melainkan juga bentuk kontribusi nyata dalam membangun jaringan antar-etnis yang harmonis dan mendukung stabilitas sosial di tingkat lokal.

2.4 Dinamika Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa

Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi politik kelompok ini tergolong tinggi, dengan kontribusi sekitar 68,4% terhadap variasi data yang dianalisis. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran politik menjadi faktor utama yang

mendorong keterlibatan masyarakat Tionghoa dalam proses politik, seperti pemungutan suara atau diskusi isu kebangsaan. Sementara itu, faktor sosial-ekonomi, seperti tingkat pendapatan atau pekerjaan, tidak terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap partisipasi politik mereka. Kondisi ini menggambarkan bahwa partisipasi politik masyarakat Tionghoa di wilayah tersebut lebih dipengaruhi oleh pemahaman dan kepedulian mereka terhadap isu-isu politik serta rasa tanggung jawab sebagai warga negara, dibandingkan dengan faktor materiil atau status sosial yang mereka miliki.

Penelitian pada tahun 2024 mengenai eksistensi politisi Tionghoa di Kota Semarang menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa kini tidak lagi berperan pasif dalam proses politik. Mereka tidak hanya berpartisipasi sebagai pemilih, tetapi juga mulai terlibat secara langsung dalam dunia politik dengan menjadi anggota partai, mendukung calon dari kalangan etnis yang sama, bahkan turut serta dalam kegiatan politik di tingkat lokal. Keterlibatan ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran politik dan rasa percaya diri dalam mengekspresikan identitas etnis melalui jalur politik formal. Fenomena tersebut juga menandakan bahwa politik identitas semakin mendapat ruang dalam dinamika politik lokal, di mana solidaritas etnis menjadi salah satu faktor yang mendorong partisipasi politik dan memperkuat representasi kelompok Tionghoa dalam ranah pemerintahan daerah. Dengan demikian, keterlibatan politik masyarakat Tionghoa di Semarang tidak lagi terbatas pada partisipasi elektoral, melainkan juga tampak dalam bentuk keanggotaan partai, pencalonan diri, dan penguatan jaringan politik yang berakar pada identitas etnis mereka.

Beragam faktor turut menentukan sejauh mana masyarakat etnis Tionghoa berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang yang memiliki tingkat kesadaran politik tinggi cenderung lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta lebih aktif menyalurkan aspirasinya melalui jalur politik yang sah.

Secara lebih spesifik, kesadaran politik yang mencakup pemahaman mengenai hak pilih dan kewarganegaraan terbukti mendorong tingkat keikutsertaan mereka dalam pemilu. Di sisi lain, penelitian terhadap komunitas Tionghoa di berbagai daerah Indonesia yang umumnya berstatus minoritas menunjukkan bahwa pengalaman diskriminasi historis, stereotip sosial, serta rendahnya kepercayaan terhadap institusi politik menjadi hambatan yang menekan partisipasi mereka, sehingga keterlibatan politik cenderung bersifat terbatas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal, seperti kesadaran politik, dan faktor eksternal, seperti pengalaman diskriminasi serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga politik.